

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan konsepsional	10
F. Metode penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
A. SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN KEPUTUSAN TATA USAHA	17
B. ASAS-ASAS YANG BERLAKU DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	31
C. SUMBER HUKUM TATA USAHA NEGARA (HUKUM ADMINISTRASI NEGARA).....	35
D. SUSUNAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA.....	37
E. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	44
F. TATA CARA PENGAJUANGUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....	49
1. Penggugat dan Tergugat	94

2. Alasan Undang dan di Undang dan	81
3. Pengajuan gugatan	83
4. Penetapan hari sidang dan peninjauan pada putusan	84
5. Kasasi Hukuman	85
6. PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN	86
1. Pemeriksaan pendahuluan	86
2. Pemeriksaan di tingkat pertama	88
3. Pemeriksaan di tingkat banding	89
4. Pemeriksaan di tingkat kasasi I dan peninjauan kembali	90
7. PEMBUKTIAN	92
1. Alat-alat bukti	92
2. Beban pembuktian	95
8. PUSAN DAN PELAKSANAAN PUSAN	97
1. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara	97
2. Pelaksanaan putusan	97
3. Ganti rugi	99
4. Rehabilitasi	99

DAFTAR III KRONOLOGIS – PENTETAPAN – SINGKELA – TATA USAHA NEGARA ANTARA DIREKSI PUBM DAN KARYAWANNYA

A. PIHAK YANG BERSINGKELA	71
1. Penggugat	71
2. Tergugat	71
B. DUDUK PERKARA	72
1. Pengadilan tata usaha Negara Sebagai Pengadilan Tingkat I	72
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tingkat Banding	78
3. Mahkamah Agung	80
C. PERTIMBANGAN HUKUM	83
1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara	83

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	84
3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.....	86
D. AMAR PUTUSAN	87
1. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	87
2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	88
3. Amar Putusan Mahkamah Agung.....	88

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI BNI 1946 AKIBAT SKANDAL PEMALSUAN LC FIKTIF

A. ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....	89
B. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SUDAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.	98

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	104
B. SARAN.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN